ABSTRAK

Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Suriah adalah negara yang sedang dilanda konflik yang tak berujung sejak tahun 2011. Untuk menghindari bencana perang di negaranya, rakyat Suriah mencari suaka dan menjadi pengungsi ke beberapa negara tetangga. Akan tetapi, negara Eropalah yang justru menyambut dengan terbuka para pengungsi dari Suriah itu. Negara-negara Teluk tetangganya justru tinggal diam terhadap permasalahan pengungsi dari Suriah. Maka dari itu, arus pengungsi Suriah sangat banyak di benua Eropa yang mengakibatkan terjadinya krisis pengungsi. Terdapat dua rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu bagaimana peran Uni Eropa sebagai Organisasi Regional dalam menangani pengungsi di Negara-negara Eropa dan bagaimana bentuk tanggung jawab Negara-negara Eropa yang menjadi tujuan pengungsi konflik Timur Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Peran Uni Eropa (UE) sebagai Organisasi Regional dalam menangani pengungsi di Negara-negara Eropa yaitu UE mempunyai standar yang harus dipenuhi untuk para pengungsi, yang disebut dengan CEAS *(Common European Asylum System*). Diaplikasikan oleh EASO (*European Asylum Support Office*). Tidak hanya penanganan di dalam kawasan Eropa saja, untuk mengurangi jumlah pengungsi, UE juga menerapkan kebijakan ENP (*European Neighbourhood Policy*). Tanggung jawab Negara-negara Eropa cukup baik dalam menangani krisis pengungsi ini. Salah satu contohnya adalah Jerman yang begitu terbuka dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Negara-negara anggota UE juga wajib menjalankan prinsip *non-refoulement,* karena semua Negara anggota UE merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Pengungsi Suriah, Uni Eropa, Tanggung jawab Negara.

ABSTRACT

The Europe Union (EU) is facing its biggest immigration issue since the World War II with the rapid growth of asylum seekers from Syria to the Europe. The country has been hit by an armed conflict since 2011 without any predications that it will end soon. To avoid the ill fated life in their country, people of Syria begin to seeking asylum in the nearby countries. Apparently only the European countries who welcome the refugees with an open hand, the Gulf countries around Syria turn their back over the refugees issue. Therefore the flows of refugees to European countries rapidly grow and become a huge refugees crisis among them. There are two research question in this thesis, which are how's the role of EU as a regional organization in dealing with refugees in European countries and how about the state responsibilities of European countries as the destination of the Middle East conflict's refugees.

Research method used in this thesis was a normative juridical method with descriptive on research specification. This thesis was also using library research from which the writer collect the primary, secondary and tertiary law data that were related to the thesis analysis. The data were analysed with qualitative method.

The EU's role as a regional organization in the case of handling those refugees and sets a standard regulations that needs to be fullfilled called CEAS (Common European Asylum System) with an applied system of EASO (European Asylum Support Office). EU also regulates the policy of refugees for the outside region of Europe with the ENP (European Neighbourhood Policy). The responsibility of European countries are good enough to handle this refugee crisis. One example is Germany who is so open and treat the refugees well. Those countries listed as the member of EU must practice the non-refoulment policy as the consquences for the ratification of 1951 Convention and 1967 Protocol.

Key Words: Syrian Conflict, Syrian Refugees, European Union, State Responsibility.